

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBUAT BATU BATA DI DESA GENTUNGGANG KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Narita Akbar^{1*}, Lukman Hakim², Muh Yusuf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of the government in empowering brick entrepreneurs in Gentungang Village, Bajeng Barat District, Gowa Regency. The type of research used in this study was descriptive qualitative using primary data and secondary data. selected based on the view that the informant has knowledge and information about the problem under study. The results of this study indicate that the empowerment of the brick-making community in the village of Gentungang. In terms of: (a) the role of the government in regulations that have been pursued by the government, namely freeing the community from all factors that can hinder the brick-making business (b) the role of the government in dynamism namely providing guidance and training so that the business they run does not fall into a weakening condition. (c) The role of the Government as a facilitator is to provide solutions in providing counseling and training as well as assisting in marketing the bricks they have managed so far.

Keywords: *empowerment, entrepreneur, community, bricks*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan pengusaha batu-bata yang ada di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan informan 11 (Sebelas) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pembuat batu-bata di Desa Gentungang. Dalam hal: (a) Peran pemerintah dalam regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu membebaskan masyarakat dari segala faktor yang dapat menghambat usaha pembuat batu-bata (b.) Peran pemerintah dalam dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan agar usaha yang mereka jalankan tidak jatuh dalam kondisi yang semakin lemah. (c) Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu memberikan solusi dalam memberikan bentuk penyuluhan dan pelatihan serta membantu dalam pemasaran batu-bata yang mereka kelola sejauh ini.

Kata kunci: pemberdayaan, pengusaha, masyarakat, batu bata

* naritaakbar@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya untuk memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap ketidakmampuan dan keterbelakangan. Dalam masyarakat yang sudah terlalu lama menyandang kondisi kemiskinan dan ketertinggalan perlu didorong agar dapat keluar dari sindrom dan perangkap yang melilitnya. Oleh sebab itu, *community development* dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang merupakan sinergi antara potensi internal dan bantuan eksternal untuk membawa masyarakat keluar dari sindrom dan perangkap tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Bentuk dalam pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan

kemampuan masyarakat miskin untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Di desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, berpotensi menjadi peluang usaha bagi masyarakatnya khususnya usaha pembuat batu bata. terbukti saat ini desa Gentungang telah memiliki sekitar 37 kelompok pengrajin batu bata. Setiap 1 Kelompok pengrajin batu bata terdiri rata-rata 1 atau 2 anggota. Karena dalam pembuatan usaha batu bata merupakan salah satu sumber penghasilan utama masyarakat setempat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian walaupun di sana makin lama lahan yang di ambil tanahnya sebagai bahan baku pembuatan batu bata akan makin berkurang akan tapi mereka harus melanjutkan usaha tersebut karena usaha ini sudah di lakukan turun menurun dari keluarga.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai

upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 11 ayat (8)) Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan definisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson (1989) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal disuatu lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka. Definisi tersebut diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama

warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka guna mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Upaya dalam pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atau prakarsa dan partisipasi mereka guna mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan mendirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial (akses terhadap

dasar dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994). Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta

dibebankan oleh masyarakat. Perwujudan sistem ekonomi pancasila adalah pembangunan yang memadukan pertumbuhan sistem pemerataan, yang diwujudkan melalui tiga arah pembangunan. *Pertama*, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dengan mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan dengan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan usaha masyarakat. *Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan kepada daerah. Kekuatan sistem ekonomi Pancasila terletak pada laju pembangunan di daerah. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi, dimana yang menghasilkan harus menikmati dan yang menikmati harus yang menghasilkan. Ketiga arah pembangunan tersebut digerakkan oleh pemerintah dalam perannya sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator (Gunawan, 1999).

Menurut Arif (2012) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi tiga peran yaitu: Pemerintah sebagai regulator peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah sebagai dinamisor peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Pemerintah sebagai fasilitator peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan.

Strategi masyarakat lebih didominasi pada pemberdayaan aspek sikap mental, oleh karena itu landasan

utama strategi pemberdayaan masyarakat adalah strategi “memanusiakan manusia”. Konsep pemberdayaan mengandung dua variabel; yang diberdayakan “dan” yang memberdayakan” Pihak “yang memberdayakan” dapat berasal dari luar sistem “yang diberdayakan” atau dari “yang diberdayakan” itu sendiri. Akan tetapi karena demikian lemahnya posisi “yang diberdayakan” sehingga ia memiliki kemampuan terbatas untuk memberdayakan diri, maka masalah ini lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat yang dipadukan oleh sistem diluar sistem kelompok sasaran. Tiga strategi “memanusiakan manusia” sebagai dasar pemberdayaan masyarakat merupakan langkah awal dan paling penting sebelum mulai menjalankan serangkaian kegiatan memberdayakan masyarakat, pihak-pihak yang memberdayakan harus mengawali programnya dengan sudut pandang.

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu (Ndraha, 2003) Peningkatan modal Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah pemodal. Tidak

adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati yaitu pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek pemodal ini adalah, (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan system kondusif baru melalui usaha mikro kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem. Peningkatan prasarana usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah prasarana, prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan

aktifitasnya. Peningkatan Keterampilan Peningkatan keterampilan masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi, sedangkan pelatihan-pelatihan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kelurahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing nagari, desa dan kelurahan yang dapat menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat pemerintahannya. Tertatanya data tipologi kemiskinan pada masing-masing nagari, desa dan kelurahan. Serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi keluarga tidak miskin dan perantau.

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding, batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum, bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara

arsitektur lebih indah. Batu Bata dalam sebuah bangunan rumah memiliki peranan yang sangat penting, sebegus dan seindah apapun rumah tanpa batu bata belum bisa dikatakan sebuah rumah. Namun seiring perkembangan arsitektur, batu bata tak hanya sebatas pelindung sebuah rumah semata akan tetapi kini peranan batu bata bergeser kearah yang lebih luas.

Pengembangan partisipasi merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff, 1988). Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (*stakeholders*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia dalam Hakim, 2010).

Batu-bata merupakan satu dari sekian banyaknya bahan bangunan kontruksi, yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat, baik yang bermukim di pedesaan maupun di perkotaan. Batu-bata terhadap

lingkungan membuat daerah berkembang karena lingkungan pembuat bata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, dan lain-lain. Dengan adanya industri batu merah dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, karena dengan adanya suatu pembutan batu-bata di lingkungan tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan kepada sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Gentungang terutama bagi mereka yang latar belakangnya rendah.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu mulai pada bulan Juni sampai Juli. lokasi penelitian berada di wilayah Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut dipilih karena peneliti ingin mengetahui peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pembuat batu bata untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pembuat batu bata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Hal ini tersebut dikarenakan penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pembuat batu bata di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Adapun Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh dengan ucapan kata-kata, gambar, perilaku, dan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu dengan melakukan suatu wawancara kepada informan dengan berisi pertanyaan-mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, referensi-referensi, peraturan perundang-

undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Yang menjadi informan adalah orang-orang yang mempunyai usaha batu bata baik yang skala besar maupun kecil yang dianggap mampu memberikan informasi tentang data-data yang diperlukan serta aparat pemerintah Desa Gentungang. Dengan informan 11 (Sebelas) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pemberdayaan masyarakat pengrajin batu bata di Desa Gentungang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu melalui reduksi data, penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bajeng terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya disebelah selatan Kerajaan Gowa dahulu (Makassar), Kabupaten Gowa, Kecamatan Bajeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bajeng (Bajeng) atau juga sering disebut Kerajaan Bajeng adalah salah satu

kerajaan yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya disebelah Selatan Kerajaan Gowa. Adapun penguasa Raja dari kerajaan ini disebut "Karaeng Loe ri Bajeng", Sedangkan masyarakatnya dahulu dikenal dengan nama "Tu Polongbangkeng". Bajeng Barat adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini dulunya merupakan pemekaran dari Kecamatan Bajeng. Kecamatan Bajeng Barat ini memiliki 7 desa yaitu: Desa Mandalle, Desa Tanabangka, Desa Borimatangkasa, Desa Gentungang, Desa Kalemmandalle, Desa Manjalling dan Desa Tanabangka dengan jumlah penduduk keseluruhan 24. 265 jiwa.

Peran Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-Bata

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya yang diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pernyataan Sekretaris Desa Gentungang yang mengatakan bahwa dalam mengevaluasi tentang bantuan yang akan diberikan pemerintah telah melakukan upaya-upaya dengan bekerjasama antara instansi terkait, dan bantuan yang paling bagus adalah pemberian modal kepada masyarakat pengrajin batu-bata yang di cairkan melalui Bank BRI yang memudahkan masyarakat pembuat batu-bata dalam mengembangkan usahanya.

Pernyataan masyarakat pembuat batu bata yang mengatakan bahwa kami sadar bahwa hambatan didalam mengembangkan usaha kami salah satunya adalah modal, maka ketika adanya pemberian modal usaha KUR ini kami setidaknya selaku pembuat batu-bata bisa sedikit tenang dan mudah untuk meningkatkan usaha kami ini meski jenis bantuan ini berupa pinjaman.

Pernyataan diatas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa kami dari pengusaha batu-bata tentunya saling bekerjasama antara pengrajin batu-bata sebab keuntungan yang kami peroleh dari usaha kami tidak terlepas dari kinerja mereka sendiri. Dan biasanya juga pengusaha batu-bata memberi bantuan modal ringan kepada pengrajin batu-bata sehingga hasil batu-bata yang di hasil dari pengrajin akan dia ambil dibawah dengan harga aslinya dan di pasarkan.

Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Pernyataan diatas adalah pernyataan bapak kepala desa yang mengatakan bahwa untuk masyarakat pembuat batu-bata sendiri tidak melakukan suatu pelatihan. Akan tetapi

tetap menghimbau pembuat batu-bata tersebut untuk menggunakan alat modern agar membantu dan mempermudah proses pembuatan batu-bata.

Pernyataan diatas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa saat ini sangat membantu masyarakat pengrajin batu-bata dalam meningkatkan keahlian mereka dalam membuat batu-bata. akan tetapi tidak berjalan lancar karna para pengrajin masih lebih memilih menggunakan cara tradisional.

Dari beberapa informan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dalam memberikan sistem penyuluhan pembuat batu-bata dimana para pembuat batu-bata lebih memilih cara tradisional daripada cara moderen yang disarankan oleh pemerintah akan tetapi karna melihat dari kualitas batu-bata yang di hasilkan lebih bagus cara tradisional daripada cara menggunakan alat modern.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari peran pemerintah yaitu baik dari segi pemberi pelayanan ataupun sudah membantu mereka dalam memberikan bantuan modal meskipun dalam modal pinjaman Kredit Usaha

Rakyat (KUR) akan tetapi tentunya sangat bisa membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka terutama dalam membantu mencari jaringan pemasaran.

Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator yang dimaksud disini adalah cara pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat pembuat batu bata melalui pelatihan, Peningkatan keterampilan. Serta di bidang pendanaan atau permodalan.

Dari beberapa pernyataan dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini peran pemerintah Desa sebagai fasilitator sudah terlihat efektif buktinya berbagai bantuan yang sudah diberikan sudah cukup membantu bukan hanya dalam bentuk dana akan tetapi juga menyediakan sarana dalam memberikan, penyuluhan dalam cara pembuatan batu-bata dengan menggunakan mesin cetak walaupun tidak bertahan lama karna banyaknya keluhan dari masyarakat karna hasil yang diperoleh dari kualitasnya buruk. Akan tetapi pemerintah membantu pengusaha dan pengranjin batu-bata memasarkan hasil batu-bata mereka.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu Bata di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

Bentuk pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.

Strategi dalam bentuk pemberdayaan ialah kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untuk mendorong suatu kepentingan dalam memperlancar proses pemberdayaan fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat yang produktif dalam peningkatan pengrajin batu-bata, tentunya peran pemerintah harus lebih efektif lagi dalam melihat potensi masyarakatnya terutama dalam pembuatan batu-bata yang saat ini

ditekuni oleh warga masyarakat yang ada di Desa Gentungang.

Berdasarkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah sudah ada, akan tetapi masih perlu dikembangkan, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa bantuan modal usaha dari Kredit Usaha Rakyat dan bantuan dari Bank masih memiliki kekurangan, masyarakat merasa takut jika sewaktu-waktu kredit tersebut tidak dapat di bayar bunganya karena tidak produktifnya usaha mereka. Jadi masih perlu dikembangkan pemberdayaan-pemberdayaan yang dapat membantu pengusaha batu-bata.

Peningkatan Modal untuk Mewujudkan Pemberdayaan Terhadap Pengusaha Batu-Batu di Desa Gentungang

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-

langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

Peningkatan Keterampilan Terhadap Pengusaha Batu bata di Desa Gentungang

Keterampilan merupakan suatu nilai yang dapat memberikan suatu keberhasilan dalam suatu produksi dalam suatu perusahaan termasuk pembuatan batu-bata sendiri, tanpa adanya keterampilan maka sulit pengusaha dapat mengembangkan hasil produknya.

Keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah belum tetap sasaran, karena masyarakat belum memiliki daya tarik untuk mengikuti apa yang telah di kembangkan pemerintah karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan misalnya teknologi yang ditawarkan belum sesuai dengan kebutuhan, dan masih jauh dari yang dimiliki masyarakat.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pembuat Batu-Bata di Desa Gentungang

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam

arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna untuk memperbaiki mutu hidupnya.

KESIMPULAN

Bedasarkan dari hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pembuat batu-bata di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat, maka dapat disimpulkan bahwa: Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata di Desa Gentungang (a) Regulasi yang dilakukan oleh yaitu pemerintah telah membebaskan masyarakat dari segala faktor yang dapat menghambat perkembangan usaha masyarakat pengrajin batu-bata; (b) Dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat pengrajin batu-bata agar usaha yang mereka jalankan tidak jauh dari kondisi yang semakin lemah; (c) Fasilitator Pemberian Dana akan tetapi baik dari penyuluhan, pelatihan dalam peningkatan keterampilan diharapkan mampu meningkatkan kualitas para

pengrajin batu-bata yang di Desa Gentungang. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata di di Desa Gentungang; (d) Peningkatan modal usaha, peningktan keterampilan dan keterampilan prasarana.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan kelompok pengusaha batu-bata, sehingga dalam membuat program lebih memperhatikan kebutuhan kebutuhan pengusaha untuk meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan agar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. benar-benar dirasakan masyarakat di Desa Gentungang.

REFERENSI

- Arif. (2012). *Peran dan fungsi pemerintah*. Diakses pada 12 february 2012<http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html>. Diambil tanggal 15 januari 2017.
- Chistenson., & Robinson. (1989). *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ndraha. (2003). *Kronologi Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Alfabeta.

- Parsons. (1994). *The Integration of Social Practice*. California: Brooks/Cole.
- Sunyoto, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uphoff, N. (1988). *Menyesuaikan Proyek Pada Manusia. dalam M.M. Cernea (eds). 1988. Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan (Publikasi Bank Dunia)*. Penerjemah B.B. Teku. Jakarta: UI Press.
- World Bank. (2001). *Attacking Poverty with a Three-Pronged Strategy. World Bank Policy and Research Bulletin, 11(4)*.